



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Pendahuluan

1.1 Informasi Umum

Secara geografis Padang Panjang terletak antara 100° 20' dan 100° 04' Bujur Timur serta 0° 27' dan 0° 32' Lintang Selatan, dengan luas 2.300 Ha atau sekitar 0,05% dari luas Provinsi Sumatera Barat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Datar. Padang panjang terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur, memiliki topografi bergelombang dan terletak pada dataran tinggi dengan iklim sejuk dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi.

Dalam Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah secara langsung yang sudah dilaksanakan pada bulan Juli 2013, telah menetapkan kandidat terpilih, yakni:

- Walikota : H. Hendri Arnis, BSBA
- Wakil Walikota : dr. Mawardi, M.Kes

Visi jangka menengah daerah yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang (RPJMD) 2013-2018 “AMANAHAH, AMAN DAN SEJAHTERA”

Berdasarkan visi tersebut ditetapkan misi pembangunan Padang Panjang 2008-2013 sebagaimana berikut:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, bertaqwa, berakhlak mulia, profesional, unggul dan bersaing melalui pelayanan pendidikan yang prima dan berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat;
- c. Mengoptimalkan potensi perekonomian daerah yang bertitik tolak pada peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis perdagangan, industri dan pariwisata yang dibangundengan semangat islami dan dilandasi modernitas serta kegotongroyongan;
- d. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota dalam rangka mendukung pelayanan dasar;
- e. Meningkatkan sarana pelayanan umum, seperti pusat perbelanjaan/pasar rakyat, sarana jalan lingkar yang mendukung hidupnya ekonomi rakyat;
- f. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam kota secara optimal, bijaksana dan berkelanjutan;



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- g. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung tegaknya praktik pemerintahan yang amanah dan anti kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Reformasi keuangan negara telah membawa implikasi pada pengelolaan keuangan daerah yang terdesentralisasi, diwujudkan dalam suatu sistem yang transparan dan akuntabel serta terukur.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang (LKPD) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2013. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2013 Pemerintah Kota Padang Panjang menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan Keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktifitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan dilakukan dalam satu periode pelaporan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya.

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 berupa Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Padang Panjang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang Panjang serta Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Padang Panjang. LKPD TA 2013 Pemerintah Kota Padang Panjang merupakan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2013, Pemerintah Kota Padang Panjang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengeliminasi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan pemetaan dan konversi.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. CaLK mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh SAP serta penjelasan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penyajian CaLK Tahun 2013 meliputi hal-hal berikut:

- a. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD;



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
- c. Kebijakan Akuntansi;
- d. Penjelasan pos-pos laporan keuangan;
- e. Informasi lainnya.

2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Dalam Tahun 2013, kebijakan ekonomi makro Pemerintah Kota Padang Panjang diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor rill dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas serta mengurangi jumlah penduduk miskin. Hal ini ditempuh dengan mengembangkan sistem pelayanan publik yang mendorong investasi, perluasan ekspor, pemberdayaan usaha mikro, revitalisasi pertanian dengan pengembangan kluster agrobisnis dan industri dalam konteks pengembangan kawasan agropolitan serta pengembangan agrowisata dan ekowisata.

Sehubungan hal tersebut, langkah kebijakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan produk komoditi ekspor yang berbasis ekonomi lokal seperti palawija, perikanan, ternak, industri kerajinan lokal, dan lainnya;
- b. Memperkuat jejaring bisnis lokal dengan BUMD, lembaga keuangan daerah, koperasi untuk menciptakan terjadinya persaingan di tingkat lokal dalam rangka menuju kepada keunggulan persaingan secara global;
- c. Mengembangkan sistem pengaturan yang baik (*good governance*) dalam sistem pengelolaan pemerintahan yang kondusif bagi peningkatan peluang investor dalam negeri dan luar negeri untuk menanamkan investasinya di Padang Panjang.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang secara umum pada Tahun 2012 adalah sebesar 6,24%. Terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan Tahun 2011 yang hanya tumbuh sebesar 6,14%. Hal ini mengindikasikan semakin membaiknya kinerja perekonomian di Kota Padang Panjang pada Tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dilihat pada masing-masing sektor ekonomi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor dengan tingkat pertumbuhan tertinggi yaitu mencapai 8,18% di Tahun 2012. Di peringkat kedua adalah sektor bangunan yang



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

memiliki pertumbuhan mencapai 7,48%. Di peringkat ketiga adalah sektor jasa-jasa, yang mampu tumbuh sebesar 6,86%.

Berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku, pada Tahun 2012 jumlah nilai tambah seluruh sektor ekonomi di Kota Padang Panjang mencapai 1.175,85 milyar rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan, pada Tahun 2012 jumlah nilai tambah seluruh sektor ekonomi di Kota Padang Panjang mencapai 474.561,42 milyar. Untuk angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Padang Panjang Tahun 2012 diharapkan mencapai Rp24.401.868,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.210.829,00 dari Tahun 2011 sebesar Rp22.191.039,00.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengelola APBD TA 2013 meliputi hal sebagai berikut:

2.2.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan anggaran pendapatan merupakan salah satu upaya untuk mencapai target pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan pembangunan daerah guna merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Adapun kebijakan di bidang Pendapatan Daerah untuk TA 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan sumber penerimaan daerah disamping pajak, terutama dari pengelolaan kekayaan alam, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah;
- b. Meningkatkan porsi pengeluaran pembangunan dalam belanja dan pembiayaan daerah sehingga mampu meningkatkan PDRB Kota Padang Panjang;
- c. Peningkatan pendapatan daerah melalui kegiatan yang bersifat intensifikasi;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, peningkatan profesionalisme pegawai dan lain-lain;
- e. Melakukan peningkatan akurasi data sumberdaya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- f. Penyempurnaan dasar hukum Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

2.2.2 Kebijakan Umum pada Aspek Belanja Daerah

Kebijakan di bidang pengeluaran dilakukan dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sistem anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi keuangan daerah;
- b. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan administrasi dan manajemen belanja daerah;
- c. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja daerah dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang berkelanjutan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat;
- d. Belanja lebih diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar seperti: urusan pendidikan, kesehatan dan urusan perumahan serta permasalahan mendasar disetiap SKPD;
- e. Terlaksananya penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD serta lembaga kerjasama daerah yang diharapkan akan berdampak terhadap pengembangan produksi daerah dan peningkatan perekonomian daerah;
- f. Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja daerah.

2.2.3 Penentuan Sumber / Penggunaan Pembiayaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang TA 2013 (setelah perubahan) menganggarkan defisit sebesar Rp57.570.692.601,17. Anggaran defisit tersebut direncanakan akan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp57.570.692.601,17 namun dalam realisasi setelah pelaksanaan kegiatan Tahun 2013 ternyata surplus sebesar Rp10.007.000.000,00.

Anggaran dan realisasi pembiayaan daerah TA 2013 adalah sebagai berikut:

2.2.3.1 Penerimaan

Penerimaan pembiayaan TA 2013 dianggarkan sebesar Rp67.577.692.601,17 dengan realisasi seluruhnya (100%) berupa penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun lalu.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

2.2.3.2 Pengeluaran

Pengeluaran pembiayaanTA 2013 dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp10.007.000.000,00 untuk kegiatan Penyertaan modal Pemerintah daerah (Investasi) berupa penambahan investasi pada PT Bank Nagari sebesar Rp10.007.000.000,00.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD TA 2013, dilaksanakan dengan pendekatan rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja. Pada akhir tahun kegiatan dilakukan pengukuran dan pelaporan hasil capaian sasaran, program dan kegiatan tersebut secara lengkap dan komprehensif dalam suatu laporan tersendiri yakni Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada TA 2013 merupakan pelaksanaan tahunpertama dari RPJM Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013. Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013, ditetapkan sembilan prioritas utama pembangunan daerah tahunan yang dijabarkan ke dalam fokus, program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengamalan dan penerapan ajaran agama dan nilai-nilai ABS-SBK;
- b. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan :
 - 1) Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan;
 - 2) Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- c. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih;
- d. Revitalisasi pertanian, optimalisasi pemanfaatan lahan, pengembangan agro industri dan integrasi pembangunan pertanian;
- e. Pengembangan industri dan pariwisata.

Guna mencapai sasaran agenda tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang melaksanakan berbagai program yang didukung oleh pelaksanaan kegiatan di satuan kerja. Untuk mendukung dan merealisasikan kegiatan dimaksud,



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Pemerintah Kota Padang Panjang mengalokasikan anggaran melalui belanja langsung Rp475.637.931.961,17 dengan realisasi sebesar Rp393.183.728.547,36.

Adapun ikhtisar capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berlangsung selama TA 2013 disampaikan dalam laporan tersendiri, dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Padang Panjang Tahun 2013.

3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam TA 2013, Pemerintah Kota Padang Panjang merencanakan penerimaan Daerah melalui APBD Perubahan sebesar Rp418.067.239.360,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang masing-masing sebesar Rp37.828.203.121,00 dan Rp341.027.619.639,00 serta Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp39.211.416.600,00. Rencana penerimaan sejumlah tersebut, akan digunakan untuk membiayai Belanja Daerah sebesar Rp475.637.931.961,17. Belanja Daerah tersebut direncanakan untuk membiayai:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp243.211.601.231,00;
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp107.796.125.409,00;
- c. Belanja Modal sebesar Rp93.655.223.780,00;
- d. Belanja Hibah sebesar Rp13.163.000.000,00;
- e. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.149.400.000,00;
- f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop/Kab/Kota/Desa/Parpol sebesar Rp500.000.000,00; dan
- g. Belanja Tak Terduga sebesar Rp13.162.581.541,17.

Kekurangan dana untuk membiayai belanja dan transfer selama TA 2013 sebesar Rp57.570.692.601,17 akan didanai dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp57.570.692.601,17 setelah dikurangi dengan rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.007.000.000,00.

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD TA 2013 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan TA 2013 diperoleh realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp417.015.118.681,83. Jumlah tersebut mencapai 99,75%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

dari jumlah pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp418.067.239.360,00. Secara rinci anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah TA 2013 dalam tabel berikut.

Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendapatan Tahun 2013

Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%	Diatas (dibawah)
	Rp	Rp		Rp
Pendapatan Asli Daerah	37.828.203.121,00	41.513.488.241,83	109,74	3.684.285.12083
Pendapatan Transfer				
Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	341.027.619.639,00	336.164.737.840,00	98,57	(4.862.881.799,00)
Bagi Hasil Pajak	14.223.513.495,00	15.336.319.838,00		1.112.806.343,00
Bagi Hasil SDA	1.224.897.144,00	932.374.002,00		(292.523.142,00)
Dana Alokasi Umum	302.846.549.000,00	302.846.549.000,00		0,00
Dana Alokasi Khusus	22.732.660.000,00	17.049.495.000,00		(5.683.165.000,00)
Pusat Lainnya	28.620.181.000,00	28.620.181.000,00	100,00	0,00
Dana Penyesuaian	28.620.181.000,00	28.620.181.000,00		0,00
Pemerintah Provinsi	9.498.604.000,00	9.624.080.000,00	101,32	125.476.000,00
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi/Pemda Lainnya	9.498.604.000,00	9.624.080.000,00		125.476.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yg Sah	1.092.631.600,00	1.092.631.600,00	100,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00		0,00
Bantuan Keuangan dari Prop/Pemda Lainnya	1.092.631.600,00	1.092.631.600,00		0,00
Jumlah	418.067.239.360,00	417.015.118.681,83	99,75	(1.052.120.678,17)

Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan komponen utama pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah melebihi jumlah yang ditargetkan sedangkan Pendapatan Transfer tidak mencapai target yang ditetapkan.

Dari empat jenis penerimaan PAD, hanya satu jenis yang realisasinya tidak mencapai target, yakni Pajak Daerah sebesar 99,57%. Untuk pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah melampaui dari target yang ditetapkan yakni 104,70 %, 103,36, % dan 113,56% dari target.

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah TA 2013 tercatat sebesar Rp5.355.477.609,22. Jumlah tersebut lebih besar sebesar Rp240.517.609,22 atau 4,49% diatas target sebesar Rp5.114.960.000,00.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan melebihi target sebesar 103,36% yaitu Rp4.259.913.723,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.121.243.121,00.

Dari total realisasi pendapatan sebesar Rp417.015.118.681,83 diantaranya sebesar Rp41.513.488.241,83 atau 9,95% merupakan pendapatan yang berasal dari PAD. Pada Tahun 2012 kontribusi PAD terhadap total realisasi Pendapatan Daerah hanya sebesar 8,69% berarti terjadi kenaikan sebesar 1,26%. Secara rinci capaian perolehan pendapatan daerah Tahun 2013 jika dibandingkan dengan Tahun 2012 dalam tabel berikut.

Perbandingan Realisasi Tahun Anggaran 2013 dan 2012

Jenis Pendapatan	Realisasi 2013	Realisasi 2012	Diatas (dibawah)	
	Rp	Rp	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah	41.513.488.241,83	32.420.607.300,28	9.092.880.941,55	21,90
Pendapatan Transfer				
Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	336.164.737.840,00	309.022.360.103,00	27.142.377.737,00	8,07
Bagi Hasil Pajak	15.336.319.838,00	12.041.231.876,00	3.295.087.962,00	21,48
Bagi Hasil SDA	932.374.002,00	8.741.026.227,00	(7.808.652.225,00)	(837,50)
Dana Alokasi Umum	302.846.549.000,00	269.610.492.000,00	33.236.057.000,00	10,97
Dana Alokasi Khusus	17.049.495.000,00	18.629.610.000,00	(1.580.115.000,00)	(9,26)
Pusat Lainnya	28.620.181.000,00	22.296.642.000,00	6.323.539.000,00	22,09
Dana Penyesuaian	28.620.181.000,00	22.296.642.000,00	6.323.539.000,00	(22,09)
Pemerintah Provinsi	9.624.080.000,00	9.149.168.000,00	474.912.000	4,93
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi/Pemda Lainnya	9.624.080.000,00	9.149.168.000,00	474.912.000	4,93
Lain-lain Pendapatan Daerah Yg Sah	10.716.711.600,00	9.149.168.000,00	1.567.543.600,00	14,63
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Prop/Pemda Lainnya	1.092.631.600,00	0,00	0,00	100
Jumlah	417.015.118.681,83	372.888.777.403,28	44.126.341.278,55	99,75

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2013 sebesar Rp417.015.118.681,83 mengalami peningkatan sebesar Rp44.126.341.278,55 atau 10,58% diatas realisasi pendapatan Tahun 2012 sebesar Rp372.888.777.403,28. Peningkatan tersebut terutama disebabkan peningkatan pada komponen Dana Perimbangan, dimana peningkatan terbesar pada Dana Alokasi Umum sebesar Rp33.236.057.000,00 atau 10,97%.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

3.1.2 Belanja Daerah

Sesuai dengan SAP, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Pengertian dan maksud dari masing-masing jenis belanja dan transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun anggaran);
- Belanja tak terduga merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
- Transfer merupakan pengeluaran bagi hasil ke pemerintah desa/nagari atau daerah bawahan.

Realisasi belanja dan transfer bagi hasil ke pemerintah desa/nagari dalam Tahun 2013 tercatat sebesar Rp393.183.728.547,36 atau hanya mencapai 82,66% dari jumlah anggaran sebesar Rp475.637.931.961,17. Jumlah realisasi masing-masing jenis belanja dan pengeluaran dibandingkan anggarannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Diatas (dibawah)	
	Rp	Rp	Rp	%
Belanja Operasi	368.820.126.640,00	324.661.970.820,98	(44.158.155.819,02)	11,97
- Belanja Pegawai	243.211.601.231,00	224.136.160.579,00	(19.075.440.652,00)	7,84
- Barang & Jasa	107.796.125.409,00	90.089.890.242,30	(17.706.235.166,70)	16,43
- Hibah	13.163.000.000,00	9.017.579.356,00	(4.145.420.644,00)	31,49
- Bantuan Sosial	4.149.400.000,00	968.699.500,00	(3.180.700.500,00)	76,65
- Bantuan Keuangan	500.000.000,00	449.641.143,68	(50.358.855,32)	10,07
Belanja Modal	93.655.223.780,00	68.215.718.726,38	(25.439.505.053,62)	27,16
- Tanah	5.833.420.000,00	1.803.979.016,00	(4.029.440.984,00)	69,07
- Pera & Mesin	23.350.777.800,00	12.468.275.662,00	(10.882.502.138,00)	46,60
- Ged & Bangunan	29.885.488.980,00	22.085.784.685,38	(7.799.704.294,62)	26,09



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- Jalan, Irigasi & Jaringan	34.378.831.000,00	31.661.128.850,00	(2.717.702.150,00)	7,90
- Aset tetap lainnya	206.706.000,00	196.550.513,00	(10.155.487,00)	4,91
Belanja Tak Terduga	13.162.581.541,17	306.039.000,00	(12.856.542.541,17)	97,67
Jumlah Belanja	475.637.931.961,17	393.183.728.547,36	(82.454.203.413,81)	17,33

Seluruh realisasi komponen belanja berada dibawah anggaran (anggaran setelah perubahan) yang ditetapkan. Dari tiga komponen belanja yang ada yakni belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga, pengeluaran terbesar berada pada belanja operasi yaitu sebesar Rp324.661.970.820,98 atau 88,03% dari total belanja sebesar Rp368.183.728.547,36 dengan komponen terbesar pada belanja pegawai.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Pada dasarnya, dari tiga sumber pendapatan yang ada, yang dapat dikendalikan langsung oleh Pemerintah Kota Padang Panjang baik melalui kebijakan maupun intervensi hanyalah pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian capaian realisasi penerimaan atas PAD merupakan cerminan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaannya.

Realisasi penerimaan PAD secara total mencapai 109,74% dari jumlah yang ditargetkan.

4. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang serta mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam TA 2013 adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, SKPD pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun demikian, dalam TA 2013 sebagian besar SKPD selaku entitas akuntansi belum menyelenggarakan sistem akuntansi secara komprehensif sehingga proses pengolahan data untuk pelaporan pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh DPPKAD.

Organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang memiliki peran sebagai entitas akuntansi adalah satuan kerja berikut:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Sekretariat Daerah.
- d. Sekretariat DPRD.
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.
- f. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.
- g. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
- h. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.
- i. Dinas Kesehatan.
- j. Dinas Pendidikan.
- k. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
- l. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- m. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi.
- n. Dinas Pekerjaan Umum.
- o. Dinas Pertanian.
- p. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata.
- q. RSUD Kota Padang Panjang.
- r. Inspektorat.
- s. Kecamatan Padang Panjang Timur.
- t. Kecamatan Padang Panjang Barat.
- u. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- v. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- w. Kantor Pengelola Pasar.
- x. Kantor Perpustakaan dan Arsip Dokumentasi Daerah.
- y. Kantor Kesatuan Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- z. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
- aa. Kantor Pemberdayaan Masyarakat.
- bb. Kantor Lingkungan Hidup.
- cc. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. Pada akhir tahun akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas. Pendapatan bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang) yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar. Pengembalian pendapatan yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh Pengguna Anggaran. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengurang belanja dan apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasar azas bruto.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Pengeluaran anggaran untuk belanja barang yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan bersifat tidak rutin akan dikapitalisir dikelompokkan kedalam Belanja Modal apabila pengeluaran tersebut melebihi Rp300.000,00 per satuan barang. Pengeluaran untuk belanja pemeliharaan yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi akan dikapitalisir apabila melebihi jumlah untuk masing-masing belanja pemeliharaan.

Pembiayaan penerimaan dicatat dengan menggunakan azas bruto dan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Pembiayaan pengeluaran dicatat dengan menggunakan azas bruto dan diakui pada saat dikeluarkan pada Rekening Kas Daerah.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

4.3.1 Pengukuran/Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

d. Persediaan disajikan sebesar

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kota memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode *cost*.

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

- b. Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- b. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

l. Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus dengan tarif sebagai berikut:

1. Gedung dan Bangunan terbagi atas Permanen 2%, Semi permanen 4%, Darurat 10%.
2. Peralatan dan Mesin 20%.
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan 5%.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan SAP, kecuali dalam hal penyajian aset tetap.

Pada TA 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Kota Padang Panjang. Seiring hal tersebut dilaksanakan inventarisasi dan penilaian kembali atas seluruh aset tetap daerah.

Untuk pengadaan aset yang masa perolehan/pengadaan setelah TA 2005, penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (*at cost*) namun belum memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Meskipun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal ini karena belum ditetapkannya umur/masa manfaat atas aset- aset tersebut.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

No.	Perkiraan	Tahun 2013(Rp)	Tahun 2012(Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	4.060.955.402,00	3.514.177.859,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah dalam TA 2013 dan 2012, yang terdiri dari:

- Pajak Hotel	276.377.715,00	167.742.630,00,00
- Pajak Restoran	864.807.901,00	589.301.122,00
- Pajak Hiburan	679.750.000,00	864.100.000,00
- Pajak Reklame	84.206.230,00	101.742.800,00
- Pajak Penerangan Jalan	1.390.813.811,00	1.256.704.984,00
- Pajak Parkir	9.650.000,00	10.300.000,00
- Pajak Air Bawah Tanah	43.417.761,00	41.425.158,00
- Pajak BPHTB	711.931.984,00	482.861.165,00
Jumlah	4.060.955.402,00	3.514.177.859,00

Jumlah realisasi TA 2013 dan 2012 mencapai 99,57% dan 100,84% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp4.078.500.000,00 dan Rp3.485.000.000,00.

2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.355.477.609,22	19.308.185.675,58
-----------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2013 dan 2012 yang terdiri dari jenis-jenis retribusi sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum:

- Retribusi Pelyn.Kesehatan	908.953.160,00	15.399.571.473,48
- Retr. Persampahan	319.720.000,00	255.655.700,00
- Retr. Peng. Cet. KTP & Akte	142.300.000,00	76.620.000,00
- Retribusi Pakir	218.156.000,00	230.745.000,00
- Retr. Pelayanan Pasar	676.056.330,00	590.907.885,00
- Retr. Pengujian Kendaraan	161.047.000,00	126.223.900,00
- Retribusi Pemeriksaan Alat	2.327.500,00	2.100.000,00
- Pemadam Kebakaran		
- Retr. Penyedotan Kakus	19.100.000,00	10.857.500,00
Sub Jumlah	2.447.659.990,00	16.692.681.458,48



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

b. Retribusi Perizinan Tertentu

- Retribusi IMB	442.585.407,22	211.340.037,10
- Retr. Izin Gangguan	90.236.000,00	75.930.700,00
- Retr. Izin Trayek	11.010.000,00	7.930.000,00
Sub Jumlah	543.831.407,22	295.200.737,10

c. Retribusi Jasa Usaha:

- Retribusi Terminal	1.612.413.000,00	1.662.556.000,00
- Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah	315.213.312,00	281.624.980,00
- Retr. Tempat Rekreasi & OR	117.035.000,00	109.140.000,00
- Retr. Tempat Penginapan/Villa	11.710.000,00	6.410.000,00
- Retr. Rumah Potong Hewan	207.540.000,00	210.825.000,00
- Retr. Penjualan Prod. UD	100.074.900,00	49.747.500,00
Sub Jumlah	2.363.986.212,00	2.320.303.480,00
Jumlah	5.355.477.609,22	19.308.185.675,58

Jumlah realisasi TA2013 dan 2012 mencapai 104,70% dan 108,69% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.114.960.000,00 dan Rp17.765.250.000,00. Terjadi penurunan target Retribusi Daerah yang cukup signifikan pada Tahun 2013 dibandingkan dengan Tahun 2012 yang disebabkan oleh adanya pemindahan pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang kepada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, karena mulai 1 Januari 2013 RSUD Kota Padang Panjang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jumlah tersebut merupakan realisasi pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dalam TA 2013 dan 2012 mencapai 103,36% dan 97,37% yang terdiri dari:

- Bagian Laba BUMDPDAM	150.000.000,00	0,00
- Deviden Bank Nagari	4.083.898.923,00	4.079.061.056,00



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- Dana Revolving	26.014.800,00	22.768.100,00
Jumlah	4.259.913.723,00	4.101.829.156,00

4. Lain-Lain Pendapatan Asli 27.837.141.507,61 5.496.414.609,70

Daerah yang Sah

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah dalam TA2013 dan 2012 yang terdiri dari:

- Penjualan Hasil Pertanian	0,00	0,00
- Penjualan Hasil Perikanan	0,00	0,00
- Jasa giro		
• Bank Nagari	4.152.531.861,00	3.341.561.870,00
• BRI	589.072.061,00	284.436.149,00
• BNI	504.217.136,00	52.710.665,00
• BSM	96.905.112,91	31.500.479,71
• Pemegang Kas	31.767.734,00	0,00
- Lain-lain PAD	21.876.497.602,70	1.163.628.445,99
- Penjualan Aset Daerah	191.500.000,00	136.877.000,00
- Kontribusi Tetap dari PT NFI sebesar 5% dari jumlah karcis yang terjual	344.650.000,00	435.700.000,00
- Kontribusi Tahunan dari PT NFI	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah	27.837.141.507,61	5.496.414.609,70

Jumlah realisasi tersebut mencapai 113,57% dan 71,08% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp24.513.500.000,00 dan Rp7.732.500.000,00. Terjadinya peningkatan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah cukup signifikan dibandingkan dengan pendapatan tahun lalu disebabkan pemindahan pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD sebesar Rp19.394.156.583,93 atau 117,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.500.000.000,00.

5. Dana Bagi Hasil Pajak 15.336.319.838,00 12.041.231.876,00		
- Pajak Bumi & Bangunan	12.330.337.512,00	6.650.584.707,00
- Bagi Hasil BPHTB	0,00	481.469.231,00



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- Bagi Hasil PPh Pasal 21, 25, 29	2.913.816.196,00	4.768.959.977,00
- Bagi Hasil Cukai Tembakau	92.166.130,00	140.217.961,00
Jumlah	15.336.319.838,00	12.041.231.876,00

Jumlah realisasi tersebut mencapai 107,82% dan 180,49% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp14.223.513.495,00 dan Rp6.671.491.421,00.

6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam **932.374.002,00** **8.741.026.227,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan transfer dari pemerintah pusat - dana perimbangan berupa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) selama TA 2013 dan 2012. Dana Bagi Hasil SDA tersebut terdiri dari:

- DBH Kehutanan	134.297.621,00	310.271.933,00
- DBH Kelautan dan Perikanan	347.408.873,00	343.986.219,00
- DBH PBB Migas	46.694.542,00	7.243.836.175,00
- DBH SDA Pertambangan/Royalty	403.972.966,00	842.931.900,00
Jumlah	932.374.002,00	8.741.026.227,00

Jumlah realisasi tersebut mencapai 76,12% dan 64,22% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.224.897.144,00 dan Rp13.611.058.804,00.

7. Dana Alokasi Umum **302.846.549.000,00** **269.610.492.000,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan transfer dari pemerintah pusat dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dalam TA 2013 dan 2012. Jumlah penerimaan DAU tersebut mencapai 100,00 % dan 100,00% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp302.846.549.000,00 dan Rp269.610.492.000,00. DAU ini merupakan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam DAU ini telah termasuk dana tunjangan penghasilan guru-guru.

8. Dana Alokasi Khusus **17.049.495.000,00** **18.629.610.000,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan transfer dari pemerintah pusat - dana perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam TA 2013 dan 2012.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Jumlah penerimaan DAK tersebut terdiri dari:

- DAK Bidang Infrastr. Jalan	3.435.592.500,00	2.830.950.000,00
- DAK Bidang Infrastr. Irigasi	770.070.000,00	1.038.330.000,00
- DAK Bidang Kesehatan	2.619.322.500,00	2.301.810.000,00
- DAK Bidang Pendidikan	4.458.510.000,00	4.422.530.000,00
- DAK Bid. Kel & Perikanan	1.081.515.000,00	1.212.600.000,00
- DAK Bid. Pertanian-Kehut	2.107.747.500,00	2.589.680.000,00
- DAK Bid. Air Minum	740.362.500,00	773.860.000,00
- DAK Bidang Lingk. Hidup	532.170.000,00	841.440.000,00
- DAK Keluarga Berencana	495.502.500,00	629.620.000,00
- DAK Sanitasi	437.850.000,00	860.270.000,00
- DAK Bid. Kes. Trans Darat	370.852.500,00	387.050.000,00
- DAK Bidang Perdagangan	0,00	741.470.000,00
Jumlah	17.049.495.000,00	18.629.610.000,00

Jumlah realisasi tersebut mencapai 75,00% dan 100,00% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp22.732.660.000,00 dan Rp18.629.610.000,00. DAK merupakan transfer dari pemerintah pusat, dimaksudkan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional.

9. Dana Penyesuaian 28.620.181.000,00 22.296.642.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan transfer dari pemerintah pusat-lainnya berupa Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan dalam TA 2013 dan 2012.

Jumlah penerimaan Dana Tunjangan Pendidikan terdiri dari:

- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00
- Tunjangan Profesi Guru PNSD	27.243.931.000,00	21.054.642.000,00
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.376.250.000,00	1.242.000.000,00
Jumlah	28.620.181.000,00	22.296.642.000,00

Jumlah realisasi tersebut mencapai 100,00% dan 100,00 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp28.620.181.000,00 dan Rp22.296.642.000,00.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

13. Belanja Pegawai 224.136.160.579,00 204.249.169.968,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai/personalia, Kepala dan Wakil KDH serta belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam TA 2013 dan 2012.

Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri dari:

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai Negeri,

Kepala & Wakil KDH

- Gaji Pokok	95.798.567.048,00	91.177.758.253,00
- Tunjangan-Tunjangan	56.161.473.327,00	32.100.684.813,00
- Tambahan Penghasilan	30.859.995.314,00	45.305.420.000,00
- Upah Pungut	448.880.284,00	1.029.859.002,00
- Bel. Operasional KDH	280.000.000,00	300.000.000,00
- Perawatan KDH	0,00	0,00
- Tunj. Bendahara	0,00	0,00

Sub Jumlah

183.548.915.973,00 169.913.722.068,00

Belanja Anggota Dewan

- Uang Representasi	379.260.000,00	386.820.000,00
- Tunjangan Keluarga	34.608.000,00	36.237.600,00
- Tunj. Jabatan	542.314.500,00	560.889.000,00
- Tunj. Beras	43.875.000,00	38.687.040,00
- Tunj PPh/Khusus	26.308.381,00	33.949.764,00
- Tunj.Panitia Musyawarah	12.073.425,00	14.433.300,00
- Tunj.Panitia Anggaran	11.616.675,00	15.255.450,00
- Tunj.Panitia Komisi	26.826.450,00	26.856.900,00
- Tunj. Jasa Pengabdian	6.300.000,00	5.040.000,00
- Tunj. Alat Kelengkapan	14.159.250,00	14.524.650,00
- Tunjangan Perumahan	561.000.000,00	582.000.000,00
- Uang Duka/Wafat/Tugas	0,00	3.360.000,00
- Uang Paket	37.947.000,00	38.682.000,00
- Komunikasi Intensif		
- Pimpinan & Anggota	978.600.000,00	1.008.000.000,00
- Tunjangan Badan Kehormatan	5.663.700,00	5.663.700,00

Commented [M1]: Totalnya kurang 5.663.700



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Sub Jumlah	2.680.552.381,00	2.770.399.404,00
Belanja Langsung Pegawai	37.906.692.225,00	31.565.048.496,00
Sub Jumlah	37.906.692.225,00	31.565.048.496,00
Jumlah	224.136.160.579,00	204.249.169.968,00

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun 2013 dan 2012 mencapai 92,16% dan 92,37% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp243.211.601.231,00 dan Rp221.123.550.984,00.

14. Belanja Barang dan Jasa 90.089.890.242,30 81.315.223.119,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang jasa dalam TA 2013 dan 2012. Pada TA 2012 tidak disajikan rincian Belanja Barang dan Jasa, sedangkan rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2013 adalah sebagai berikut:

- Blj. Bahan Pakai Habis	4.413.866.970,00
- Blj. Bahan/Material	5.630.963.054,50
- Blj. Jasa Kantor	6.955.497.887,00
- Blj. Premi Asuransi	4.682.213.134,00
- Blj. Perawatan Kend.Bermotor	6.607.446.981,00
- Blj. Cetak dan Penggandaan	3.844.453.335,00
- Blj. Sewa Rmh/Gd/Gdg/Parkir/Tnh	1.367.931.657,00
- Blj. Sewa Sarana Mobilitas	217.554.700,00
- Blj. Sewa Alat Berat	3.520.000,00
- Blj. Sewa Perlngkpn&Prltn.Ktr.	706.185.000,00
- Blj. Makan dan Minuman	9.404.477.783,00
- Blj. Pakaian Dinas & Atributnya	1.111.158.925,00
- Blj. Pakaian Kerja	594.422.000,00
- Blj. Pakaian Khusus	897.395.000,00
- Blj. Perjalanan Dinas	14.817.617.631,80
- Blj. Beasiswa Pendidikan PNS	848.975.000,00
- Blj. Kursus, Plthn, Sos,Bimtek PNS	1.795.543.320,00
- Blj. Pemeliharaan	3.664.503.426,00
- Blj. Jasa Konsultasi	2.752.408.450,00
- Blj. Brg yg akan dirhkan kpd Masy	2.672.723.062,00
- Blj. Jasa Pihak Ketiga	1.539.783.780,00



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- Blj. Sepatu	23.550.000,00	
- Blj. Brg & Jasa BLUD	15.462.699.146,00	
- Blj. Jasa Kontribusi	75.000.000,00	
15. Belanja Bunga	0,00	0,00
Pada Tahun Anggaran 2013 dan 2012 tidak terdapat realisasi belanja bunga.		
16. Belanja Hibah	9.017.659.356,00	12.022.521.290,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja Hibah Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2013 dan 2012 kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta.		
Jumlah realisasi Belanja Hibah dan transfer Tahun 2013 dan 2012 mencapai 68,51% dan 86,78% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp13.163.000.000,00 dan Rp13.854.500.000,00 untuk Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut:		
- Belanja Hibah ke Pemerintah Pusat		0,00
- Belanja Hibah ke Pemerintah Desa	262.500.000,00	
- Belanja Hibah ke Badan/Lembaga/Orgss Swasta	8.710.159.356,00	
- Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	45.000.000,00	
Jumlah	9.017.659.356,00	
17. Belanja Bantuan Sosial	968.619.500,00	2.164.477.000,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam TA 2013 dan 2012. Jumlah realisasi Belanja Bantuan Sosial tersebut, merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk organisasi/badan yang terdiri dari:		
- Org. Kemasyarakatan	337.500.000,00	2.164.477.000,00
- Anggota Kel.Masyarakat	0,00	0,00
- Anggota Masyarakat	598.000.000,00	0,00
- Tidak Terencana	33.199.500,00	0,00
Jumlah realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2013 dan 2012 mencapai 23,35% dan 65,09% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp4.149.400.000,00 dan Rp3.325.50.000,00.		
18. Belanja Bantuan Keuangan	449.641.143,68	499.641.143,68
Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Parpol:		

Commented [M2]: Ada koreksi dimana?? Rp80.000,00

Commented [M3]: Ada koreksi dimana?? Rp80.000



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- Partai Politik	449.641.143,68	449.641.143,68
- Prov/Kabupaten/Kota	0,00	50.000.000,00

Jumlah realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2013 dan 2012 mencapai 89,93% dan 99,73% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp501.500.000,00.

19. Belanja Tanah 1.803.979.016,00 79.500.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja 30,92% dan 0,60% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.833.420.000,00 dan Rp13.214.790.679,00.

20. Belanja Peralatan & Mesin 12.468.275.662,00 15.366.681.421,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin dalam TA 2013 dan 2012 yang terdiri dari:

- Alat-alat Angkutan	364.000.000,00	5.133.061.850,00
- Alat berat	2.095.592.000,00	0,00
- Alat-alat Bengkel dan ukur	877.173.360,00	1.198.272.450,00
- Alat Pertanian	335.930.000,00	58.700.000,00
- Inventaris, Alat Kantor & RT	6.876.154.311,00	5.427.765.275,00
- Alat Kedokteran	236.377.400,00	1.225.144.000,00
- Alat-alat Laboratorium	282.150.000,00	672.762.544,00
- Alat Keamanan	255.939.750,00	47.315.000,00
- Alat Studio	1.144.958.841,00	1.603.660.302,00

Jumlah 12.468.275.662,00 15.366.681.421,00

Jumlah realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tersebut mencapai 53,40% dan 79,72% dari anggaran Tahun 2013 dan 2012 sebesar Rp23.350.777.800,00 dan Rp19.275.838.136,00.

21. Belanja Gedung & Bangunan 22.085.784.685,38 11.093.747.522,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja dan rehab berat atas fisik gedung dan bangunan dalam TA 2013 dan 2012. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2013 sebesar Rp22.085.784.685,38 dan TA 2012 sebesar Rp11.093.747.522,00. Jumlah realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2013 dan 2012 tersebut mencapai 73,90% dan 71,69% dari jumlah anggaran sebesar Rp29.885.488.980,00 dan Rp15.475.286.000,00.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

administrasi atas sisa di rekening koran pada Bank Syariah Mandiri. Biaya tersebut dikompensasikan kembali pada tahun berikutnya.

25. Bantuan Keuangan kepada Pemdesa/ Kelurahan 0,00 0,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada desa/kelurahan dalam TA 2013 dan 2012. Jumlah realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2013 dan 2012 mencapai 0,00% dan 0,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

26. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu 67.577.692.601,17 53.218.090.009,57

Jumlah tersebut merupakan realisasi penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu yang direncanakan untuk menutup defisit belanja dan tranfer bagi hasil ke desa/kelurahan. Dalam TA 2013 dan 2012, penerimaan tersebut adalah Rekening Kas Daerah masing-masing Rp67.577.692.601,17 dan Rp53.218.090.009,57.

27. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 10.007.000.000,00 8.700.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada TA 2013 dan 2012. Jumlah realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2013 dan 2012 mencapai 100,00% dan 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.007.000.000,00 dan Rp8.700.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal tersebut terdiri dari:

- Bank Nagari Sumbar	10.007.000.000,00	4.200.000.000,00
- PDAM Pdg Panjang	0,00	3.500.000.000,00
- PD. Tuah Saiyo	0,00	0,00
- PT. Balairung Citra Jaya Sumbar	0,00	1.000.000.000,00
- Dana Revolving	0,00	0,00
Jumlah	10.007.000.000,00	8.700.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

5.2 Neraca

No.	Perkiraan	Tahun 2013(Rp)	Tahun 2012(Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	28.256.694.886,71	28.205.201.615,17
	Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2013 dan 2012. Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas Pemerintah Kota Padang Panjang yang berada pada Bendaharawan Umum Daerah, disimpan pada Rekening Kas Daerah di Bank Nagari, BNI 46 dan BRI, yang terdiri dari rekening-rekening berikut:		
	- Bank Nagari Nomor .00203.3	26.381.320.157,07	22.519.953.195,44
	- BNI Nomor .0059228701	675.607.380,00	5.171.390.244,00
	- BRI Nomor .01-000252-301	1.036.179.241,00	447.107.180,00
	- BSM Nomor 1600014400	163.588.108,64	66.750.995,73
	Jumlah	28.256.694.886,71	28.205.201.615,17

Saldo Kas di Kas Daerah tersebut sudah sesuai dengan hasil rekonsiliasi Saldo Bank menurut pencatatan Bidang Akuntansi dengan saldo Bank menurut rekening koran per 31 Desember 2013 dan 2012.

2.	Kas di Bend. Pengeluaran	19.536.503,00	22.491.986,00
	Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 2012, berupa saldo UYHD yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan per 31 Desember 2013 dan 2012, dan pungutan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2013. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terinci atas:		
	- UYHD	10.515.411,00	22.490.986,00
	- PPh Pasal 21	1.442.000,00	1.000,00
	- PPh Pasal 22	806.046,00	0,00
	- PPh Pasal 23	220.855,00	0,00
	- PPN	4.118.341,00	0,00
	- Pajak Daerah	2.433.850,00	0,00
	Jumlah	19.536.503,00	22.491.986,00

3.	Deposito	49.350.000.000,00	39.350.000.000,00
	Saldo tersebut merupakan saldo deposito berjangka satu bulan di Bank Nagari cabang Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Bank Nagari (3 sertifikat deposito) senilai Rp25.350.000.000,00;		



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- b. Bank BNI (12sertifikat deposito) senilai Rp12.000.000.000,00;
- c. Bank BRI (4 sertifikat deposito) senilai Rp10.000.000.000,00;
- d. Bank Syariah Mandiri (4 sertifikat deposito) senilai Rp2.000.000.000,00.

4. Kas di Bendahara Penerima 12.038.349,90 26.135.500,00

Saldo Kas tersebut merupakan penerimaan yang masih berada pada Bendahara Penerimaan di SKPD per tanggal Neraca yang terdiri dari:

a. Dinas Kesehatan Kota		
- Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00
- Jasa Kesehatan ASKES	0,00	0,00
b. Dinas Porbudpar	412.000,00	884.000,00
c. Dinas Perhubungan	3.022.800,00	3.717.000,00
d. Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00
e. Dinas Pertanian	0,00	1.350.000,00
f. RSUD	0,00	20.184.500,00
g. UPTD Pengelolaan Dana Bergulir	8.603.549,90	0,00
Jumlah	12.038.349,90	26.135.500,00

5. Kas di Bendahara Pengeluaran 3.784.872.437,93 0,00

BLUD

Saldo Kas sejumlah tersebut merupakan saldo pada Rekening Giro BLUD RSUD Kota Padang Panjang per 31 Desember 2013.

6. Piutang Pajak 221.195.522,00 155.491.060,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2013 dan 2012. Tagihan Pajak Daerah tersebut sampai dengan tanggal Neraca belum dilunasi/disetorkan Wajib Pajak ke Kas Daerah, yang terdiri dari:

- Pajak Reklame	0,00	2.195.250,00
- Pajak Hotel	33.992.917,00	25.349.550,00
- Pajak Restoran	46.476.824,00	8.932.350,00
- Pajak Penerangan Jalan	137.330.032,00	115.375.680,00
- Pajak Air Tanah	3.395.749,00	3.638.230,00
Jumlah	221.195.522,00	155.491.060,00



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

7. Piutang Pendapatan Bagi Hasil 153.956.985,75 0,00

Pajak

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2013 dan 2012. Pendapatan tersebut merupakan bagian dari transfer dana Pemerintah Provinsi yang akan dialokasikan dalam Tahun 2013 dan 2012 ke Pemerintah Kota Padang Panjang yang sampai dengan tanggal Neraca belum ditransfer ke Kas Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang, yang merupakan kurang salur pada Tahun 2013 terdiri dari PKB Rp129.653.473,61 dan BBNKB Rp108.481.679,33, serta lebih salur atas PBBKB Rp56.552.613,86 dan PAP Rp27.625.553,33, sesuai dengan Keputusan Kepala DPKD Propinsi Sumbar Nomor 971.1/383/Dpkd-Retb-2014 tanggal 17 Maret 2014.

8. Belanja Dibayar Dimuka 255.939.750,00 0,00

Jumlah tersebut merupakan uang muka kerja atas Pengadaan Peralatan Perlengkapan Angkutan Darat Bermotor pada UPTD Pemadam Kebakaran. Proses pengadaan lelang atas pengadaan tersebut telah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tanggal 2 Mei 2013 Kepala UTP Pemadam Kebakaran mengirimkan surat Nomor 360/027/UPT-PMK/V-2013 tentang Permohonan Pelelangan Barang dan Jasa untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kepada Kepala UPTD Layanan Pengadaan Kota Padang Panjang;
- b. Proses waktu pelaksanaan kontrak mulai tanggal 30 Juli 2013 s.d. 27 Oktober 2013 (90 hari kalender);
- c. Pihak ketiga telah mengirimkan barang pada tanggal 25 Oktober 2013 dan tanggal 27 Oktober 2013 dengan volume barang yang diterima cukup;
- d. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas barang pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan hasil 6 item barang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak;
- e. Pada tanggal 19 November 2013 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kembali melakukan pemeriksaan atas barang yang dikirimkan, terdapat 5 item barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak;
- f. Pada tanggal 27 Desember 2013 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kembali melakukan pemeriksaan atas barang yang dikirimkan, terdapat 4 item barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak;
- g. Tanggal 31 Desember 2013 PA/PPK/PPTk menghadap ke DPPKAD agar dana



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya dapat dicairkan untuk pembayaran 100%, tapi tidak bisa dicairkan karena syarat administrasi belum lengkap.

- h. PPK belum ada membuat pemutusan kontrak terhadap pihak ketiga;
- i. Pihak ketiga melakukan somasi kepada PPK Kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran UPT Pemadam Kebakaran TA 2013 melalui surat Nomor 04/OMG/APAR/II/2014 tanggal 5 Februari 2014;
- j. Pengungkapan pada akun untuk Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan ganti rugi belum dicantumkan secara lengkap terhadap masalah kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran tersebut karena belum dilakukan audit oleh Inspektorat Kota maupun penyelesaian melalui pengadilan sesuai dengan somasi yang diajukan.

Disamping itu barang yang telah diterima tersebut belum ada Berita Acara Serah Terima dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dari PPK ke Pengguna Anggaran (PA) sehingga belum dicatat pada Neraca sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

9. Piutang Retribusi 444.827.241,00 1.094.729.702,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang RSUD, Dinas Pasar, Sekretaris Daerah Kota, dan Dinas Kesehatan Kota Tahun 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut:

a. Rumah Sakit Umum Daerah		
- Piutang Klaim Jamsostek	0,00	23.713.840,00
- Piutang klaim PT KAI	0,00	20.580.829,00
- Piutang Klaim Askes Sosial	0,00	431.906.923,00
- Piutang Klaim Jamkesmas	0,00	0,00
- Piutang Klaim Jamkesda	0,00	5.563.000,00
- Piutang Klaim JPKM-PP	0,00	277.245.438,00
- Piutang Klaim Asuransi In-Health	0,00	2.878.000,00
- Pendapatan Sewa Parkir	0,00	600.000,00
- Pendapatan Sewa Cafe	0,00	2.000.000,00
b. Dinas Pasar		
- Tunggakan Pertokoan Inpres	200.968.067,00	174.819.685,00



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- Tunggakan Pertokoan Non Inpres	165.172.958,00	152.554.970,00
c. Setdako	1.342.116,00	2.867.017,00
d. Dinas Kesehatan	77.344.100,00	0,00
Jumlah	444.827.241,00	1.094.729.702,00
10. Piutang Lainnya	1.416.311.853,09	0,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lainnya pada RSUD Kota Padang Panjang dan sisa laba PDAM per 31 Desember 2013 dan 2012 yang merupakan piutang atas pelayanan kesehatan yang disebabkan berubahnya status RSUD Kota Padang Panjang menjadi BLUD serta sisa laba PDAM dari Tahun 2007 s.d. 2012 yang belum disetorkan ke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut:		
a. Rumah Sakit Umum Daerah		
- Piutang Klaim Jamsostek	3.255.000,00	0,00
- Piutang klaim PT KAI	26.403.585,00	0,00
- Piutang Klaim Askes Sosial	0,00	0,00
- Piutang Klaim Jamkesmas	1.045.859.540,39	0,00
- Piutang Klaim Jamkesda	3.217.000,00	0,00
- Piutang Klaim JPKM-PP	147.235.900,00	0,00
- Piutang Klaim Asuransi In-Health	4.190.724,00	0,00
- Pendapatan Sewa Parkir	600.000,00	0,00
- Pendapatan Sewa Cafe	2.000.000,00	0,00
b. DPPKAD - Sisa Labadari PDAM	183.550.103,70	0,00
Jumlah	1.416.311.853,09	0,00
11. Persediaan	4.606.878.206,00	4.750.931.721,27
Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012, yang terdiri dari:		
- ATK, Barang cetakan	777.515.705,00	477.823.924,27
- Obat & Bahan Kimia	3.252.271.984,00	3.266.388.395,00
- Alat Listrik & rumah tangga	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- Lain-lain	182.505.130,00	972.310.902,00
- Barang Kuasi	394.585.387,00	34.408.500,00
Jumlah	4.606.878.206,00	4.750.931.721,27

12. Investasi Nonpermanen Lainnya 5.102.825.950,29 4.848.061.390,98

Commented [M4]: ga pas sama rincian

Investasi Nonpermanen Lainnya tersebut berupa Dana Bergulir sebesar Rp5.102.625.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penyertaan Awal Pemda	4.478.120.739,00
(+) Dana Penumpukan Modal	435.129.756,98
(+) Laba Tahun 2013	102.330.402,92
(+) Laba Tahun 2012	86.716.000,39
(+) Laba Tahun 2003 s/d 2011	118.314.551,00
(-) Penghapusbukuan Pinjaman	(117.785.500,00)
Jumlah Investasi Nonpermanen Lainnya	5.102.825.950,29

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Nonpermanen Lainnya Dana Bergulir per 31 Desember 2013 dan 2012 berdasarkan Laporan Keuangan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir. Pada awalnya, dana bergulir dikelola oleh Badan Pengelola Dana Revolving dana bergulir. Pada Tahun 2013, dana bergulir dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 23 April 2013. UPTD ini dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 23 April 2013, yang modalnya sepenuhnya merupakan investasi Pemerintah Kota Padang Panjang. Investasi dimaksud berupa penyaluran dana bergulir kepada masyarakat, unit usaha kecil dan menengah. Penerima berkewajiban mengembalikan dana tersebut ke UPTD Pengelolaan Dana Bergulir, untuk digulirkan kembali kepada masyarakat atau kelompok lainnya yang memerlukan.

Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 07 tentang Dana Bergulir, pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang Panjang belum mengatur metode penentuan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) dan tentang penghapusan pinjaman.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Dalam menindaklanjuti laporan hasil audit BPK mengenai status hukum dari Badan Pengelola Dana Revolving, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menerbitkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang. Untuk selanjutnya direncanakan pengelolaan dana bergulir ini menjadi BLUD. Telah diadakan rapat untuk pengusulan menjadi BLUD dimana sebelum dibentuk BLUD diusulkan agar dilakukan serah terima dari Badan revolving ke Walikota Padang Panjang dan dari Walikota Padang Panjang ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang. Aset Badan Revolving akan diperiksa oleh tim independen karena selama ini aset Badan Revolving tersebut tidak tercatat di Neraca Pemerintah Kota Padang Panjang.

13. Penyertaan Modal Pemda 42.811.910.444,79 30.980.842.777,66

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang Panjang pada perusahaan daerah dan lembaga keuangan pada posisi per 31 Desember 2013 dan 2012 Investasi jangka panjang sejumlah tersebut ditempatkan pada dua perusahaan daerah dan satu lembaga keuangan. Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang Panjang pada masing-masing perusahaan daerah dan lembaga keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. PDAM Kota Pdg. Panjang 16.388.408.698,40 16.675.105.554,45

Pencatatan dan pelaporan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang Panjang pada PDAM Kota Padang Panjang menggunakan metode equitas. Komposisi penyertaan awal antara Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pemerintah Pusat sebesar 96% dan 4%. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2013 PDAM Kota Padang Panjang, komposisi penyertaan modal berdasarkan metode equitas adalah sebesar 85,21% dan 14,79%, dengan rincian sebagai berikut:

	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat
- Penyertaan	16.931.338.216,00	2.938.528.489,00
- Modal Hibah	3.697.200,00	0,00
- Cadangan Umum	153.791.777,39	26.690.558,12
- Laba (Rugi) tahun lalu	(6.927.888,80)	(1.202.334,88)



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- Laba (Rugi) tahun berjalan	(693.490.606,19)	(120.355.272,86)
Jumlah	16.388.408.698,40	2.843.661.039,38
Persentase	85,21%	14,79%

Commented [M5]: total 2.834.661.439,38

Pada LKPD Tahun 2012 terdapat Penyertaan Modal Pemko Padang Panjang pada PDAM Kota Padang Panjang sebesar Rp13.507.009.911,25 (*Unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:

	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat
- Penyertaan	13.032.780.216,24	1.064.950.045,71
- Modal Hibah	3.697.200,00	0,00
- Cadangan Umum	82.751.218,63	6.757.941,60
- Laba (Rugi) tahun lalu	200.324.876,41	16.359.684,34
- Laba (Rugi) tahun berjalan	<u>187.456.400,49</u>	<u>15.308.770,40</u>
Jumlah	13.507.009.911,77	1.103.376.442,05
Persentase	92,45 %	7,55 %

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2013 untuk laporan Keuangan PDAM Tahun 2012 telah dilakukan Audit sehingga dilakukan koreksi saldo awal Tahun 2013 atas penyertaan modal Pemko pada PDAM Kota Padang Panjang dengan komposisi 84,55% dan 15,45% dengan rincian sebagai berikut:

	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat
- Penyertaan	16.082.960.216,00	2.938.529.489,00
- Modal Hibah	3.697.200,00	0,00
- Cadangan Umum	75.681.366,56	13.827.793,44
- Laba (Rugi) tahun lalu	507.280.776,75	92.685.612,25
- Laba (Rugi) tahun berjalan	5.485.995,14	1.002.349,86
Jumlah	16.675.105.554,45	3.046.044.244,55
Persentase	84,55 %	15,45 %

Commented [M6]: total 3.046.045.244,55

Adapun nilai kekayaan Pemko yang dipisahkan sejumlah tersebut merupakan nilai penyertaan dalam bentuk penyerahan aset melalui proyek-proyek yang dibiayai dari dana APBD dan APBN yang telah diserahkan hak dan pengelolaannya kepada manajemen PDAM melalui Pemerintah Kota Padang Panjang.

b. PD. Tuah Saiyo 0,00 1.057.331.119,50

Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada PD Tuah Saiyo sebesar Rp1.057.331.119,50, PD Tuah Saiyo sejak Tahun 2006 tidak



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

beroperasi lagi, sehingga pemerintah daerah harus menyelesaikan status dari perusahaan daerah tersebut termasuk mengenai aset-asetnya.

Pada Tahun 2012 disahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tanggal 6 Juni 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Tingkat II Padang Panjang. Dengan disahkannya peraturan daerah tersebut diatas, maka pemerintah Kota Padang Panjang menyikapinya dengan membentuk Tim Likuidatur untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian terhadap aset tetap dari PD Buah Saiyo.

Kondisi Keuangan PD Buah Saiyo sesuai Neraca per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

1) AKTIVA

a) Aktiva Lancar

- Kas	: Rp	370.744,00
- Piutang Usaha	: Rp	48.190.500,00
- Piutang Direktur & Karyawan	: Rp	8.005.000,00
- Persediaan	: Rp	277.001.346,00

b) Aktiva Tetap

- Aktiva Tetap/Inventaris	: Rp	1.308.875.000,00
- Akumulasi Penyusutan	: (Rp	829.102.476,00)

c) Aktiva Lain-lain

- Pembayaran Laba Kepada Pemda	: Rp	37.500.000,00
--------------------------------------	------	---------------

2) PASSIVA

- Utang	: Rp	37.281.691,00
- Modal	: Rp	813.558.423,00

Hasil penyelesaian likuidasi PD Buah Saiyo sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

1) Dari total Aktiva Tetap senilai Rp1.308.875.000,00 telah ditindaklanjuti oleh Tim Likuidatur sebagai berikut:

a) Untuk aktiva tetap yang masih bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah senilai Rp653.222.500,00 pada Tahun 2012 telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Bangunan Gedung senilai Rp303.495.500,00 (Berita Acara Serah Terima Nomor 900/03/BA/TIM-LIKUIDATUR/PP/VI-2012 tanggal 18 Juni



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

2012). Salah satu dari bangunan gedung tersebut yaitu Gedung Pengolahan Kulit senilai Rp157.509.000,00 yang terletak disamping UPTD Pengolahan Kulit Silaing Bawah karena sudah rusak berat dan membahayakan keselamatan orang disekitarnya, telah dihapus dari Daftar Inventaris Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 024/322/Wako-PP/2012 tanggal 8 Oktober 2012. Sisanya senilai Rp145.986.500,00 dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 024/146/Wako-PP/2013 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kota Padang Panjang Eks Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang kepada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, telah didistribusikan kepada SKPD yang terkait sebagai berikut:

- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, senilai Rp5.986.500,00 berupa bangunan gudang timbangan kapur di Bancah Laweh yang dicatatkan pada akun aset lainnya.
 - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika senilai Rp140.000.000,00 yang terdiri dari 13 petak kios/toko yang berada di areal terminal Bukit Surungan.
- Peralatan dan Mesin senilai Rp349.727.000,00 (Berita Acara Serah Terima Nomor 900/11/BA/TIM-LIKUIDATUR/PP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012). Sesuai dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 024/322/Wako-PP/2012 tanggal 8 Oktober 2012 diatas telah didistribusikan kepada:
- Dinas Koperasi, UMKM Perindag, nilai inventaris sebesar Rp94.415.000,00 terdiri dari alat operasional pabrik senilai Rp90.335.000,00 dan alat-alat kantor senilai Rp4.080.000,00 yang dioperasikan pada UPTD Pengolahan Kulit.
 - Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, senilai Rp255.312.000,00, terdiri dari timbangan kapur senilai Rp218.488.000,00 dan Mobil Toyota Kijang Pick Up senilai Rp36.824.000,00 yang dicatatkan pada akun aset lainnya.
- b) Untuk aset yang rusak berat serta aset yang tidak mungkin dioperasikan oleh pemerintah daerah senilai Rp590.652.500,00 telah dihapuskan dari daftar



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

inventaris dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 024/440/Wako-PP/2012. Dari aset tetap yang dihapuskan tersebut, terdapat barang/peralatan yang masih memiliki nilai ekonomis senilai Rp519.627.000,00 dan telah dilelang pada Tahun 2012 dengan harga Rp42.500.000,00 yang kita setor ke Kas Daerah setelah selesainya proses penyelesaian utang/piutang perusahaan.

- c) Total Aktiva Tetap yang telah ditindaklanjuti adalah sebesar Rp1.243.875.000,00. Sisanya sebesar Rp65.000.000,00 adalah berupa 1 (satu) unit mobil vitara dengan nilai perolehan Rp65.000.000,00 yang tidak ditemukan fisiknya. Untuk penyelesaian pertanggungjawaban atas tidak ditemukannya mobil tersebut akan dilimpahkan pada Inspektorat Kota Padang Panjang.
- 2) Dari total Persediaan sebesar Rp277.001.346,00 setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penilaian Nomor 900/14/BA-Aset/XI-2012 tanggal 13 November 2012 disimpulkan bahwa barang persediaan yang terdiri dari barang setengah jadi (sepatu dan sandal), bahan-bahan pendukung, bahan-bahan kulit yang sudah lapuk, bahan kimia yang sudah kadaluwarsa dan bahan-bahan kapur, semuanya sudah tidak layak pakai lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Berdasarkan rekomendasi tim penilai tersebut barang persediaan tersebut telah dihapus dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 024/440/Wako-PP/2012.
- 3) Dari total Piutang sebesar Rp56.195.500,00 yang terdiri dari piutang usaha sebesar Rp48.190.500,00 dan piutang direktur dan karyawan sebesar Rp8.005.000,00 serta Total Utang sebesar Rp37.281.691,00 setelah dilakukan penelusuran terhadap kreditur dan debiturnya oleh Tim Likuidatur ternyata tidak dapat diketahui keberadaannya. Upaya terakhir yang dilakukan adalah memasang pengumuman kepada publik melalui media Surat Kabar Harian Singgalang tanggal 11 Februari 2013 dimana untuk penyelesaian utang dan piutang yang terkait dengan PD. Tuah Saiyo diberi tenggang waktu dari tanggal 11 s/d 15 Februari 2013. Ternyata sampai dengan akhir masa tenggang tidak ada pihak yang mengklaim utang dan piutang PD Tuah Saiyo kepada Tim Likuidatur. Berdasarkan hasil tersebut diterbitkanlah Keputusan Walikota Nomor



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Penyertaan Modal pada PTBank Nagari telah memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dalam bentuk setoran laba/ dividen tunai. Kontribusi dalam TA 2013 dan 2012 tercatat sebesar Rp4.083.898.923,00 dan Rp4.079.061.056,00

d. PT Balairung Citra Jaya 2.824.899.000,00 2.824.899.000,00

Nilai investasi Jangka Panjang yang ditempatkan pada PT Balairung Citra Jaya Sumbar per 31 Desember 2013 dan 2012 tercatat sebesar Rp2.824.899.000,00 dan Rp2.824.899.000,00.

14. Tanah 162.644.904.915,00 162.525.825.899,00

Commented [M7]: ga sama dengan rincian

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Padang Panjang pada posisi 31 Desember 2013 dan 2012. Terdapat kenaikan nilai aset tanah sebesar Rp119.079.016,00 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Realisasi belanja modal tanah Tahun 2013 Rp1.803.979.016,00
- b. Mutasi Kurang berupa:
 - a. Empat persil tanah yang digunakan dalam kerja sama Pembangunan Kawasan Perdagangan Bukit Surungan terdiri dari 3 persil tanah seluas 2.867m² sebesar Rp1.433.500.000,00 dan 1 persil tanah seluas 1.917m². (1.433.500.000,00)
 - b. Tanah rumah dinas Wakil Walikota sebesar Rp251.400.000,00 yang dicatat dua kali. (251.400.000,00)

Sub Jumlah b (1.684.900.000,00)

Selisih a dan b Rp119.079.016,00

Jadi peningkatan nilai tanah dari Saldo Awal 2013 sampai dengan Saldo Akhir 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Saldo Awal Tahun 2013	Rp162.525.825.899,00
- Belanja modal tanah Tahun 2013	1.803.979.016,00
- Mutasi tambah tanah Tahun 2013	0,00
- Mutasi kurang tanah Tahun 2013	(1.684.900.000,00)
Saldo akhir Tanah Tahun 2013	Rp162.644.904.915,00

Informasi terkait Aset Tetap Tanah:

- a. Nilai tanah diatas terdiri dari 217 persil tanah dengan luas, sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- 1) Telah memiliki sertifikat sebanyak 116 persil tanah yang terdiri dari :
 - a) Sertifikat atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang sebanyak 68 persil tanah;
 - b) Sertifikat atas nama pemilik semula sebanyak 48 persil tanah.
- 2) Belum memiliki sertifikat sebanyak 101 persil tanah.
- b. Terdapat mutasi tanah SMK dari Setdako ke DPPKAD sebesar Rp914.350.000,00
- c. Dari belanja modal tanah Tahun 2013 terdapat pembayaran somasi atas tanah SDN 18 Silaing Bawah sebesar Rp613.530.086,00 dengan luas tanah 1.500m², nilai pembayaran somasi tanah tersebut diakumulasikan pada nilai tanah namun luasnya tidak diakumulasikan karena telah tercatat sebelumnya tanah SDN 18 Silaing bawah seluas 1.500m².
- d. Terdapat tanah yang dipinjampakaikan kepada Pegawai/Instansi Pemerintah Pusat sebesar Rp395.500.000,00 berupa tanah di Jl. Syech M. Jamil Jaho No. 12 seluas 1.582m².

15. Peralatan dan Mesin 166.525.353.542,04 158.364.551.757,63

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Padang Panjang pada posisi 31 Desember 2013 dan 2012 yang terdiri dari:

- Alat-Alat angkutan	31.314.318.349,00	29.403.557.349,00
- Alat berat	3.958.550.000,00	3.600.500.000,00
- Alat kantor & RT	52.021.392.805,04	48.910.929.922,63
- Alat kedokteran	56.355.662.826,00	56.235.028.304,00
- Alat laboratorium	10.647.449.254,00	10.113.773.855,00
- Alat pertanian	1.335.100.895,00	878.869.895,00
- Alat bengkel & ukur	2.868.190.800,00	1.990.410.950,00
- Alat Studio & komunikasi	7.588.112.863,00	6.797.897.732,00
- Alat Keamanan	436.575.750,00	433.583.750,00
Jumlah	166.525.353.542,04	158.364.551.757,63

Terdapat kenaikan nilai aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.160.801.784,41 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin Tahun 2013 Rp12.468.275.662,00
- b. Mutasi tambah berupa:
 - 1) Pertambahan aset tetap dari hasil sensus sebesar 3.238.996.215,00



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

2) Dikapitalisir dari Belanja Barang Jasa sebesar	173.714.926,00
3) Hibah dari Pihak ketiga sebesar	5.000.000,00
4) Reklasifikasi dari AT Gedung dan Bangunan sebesar	29.635.693,00
5) Mutasi antar SKPD sebesar	834.749.750,00
6) Koreksi penyesuaian nilai	1.128.848,37
Sub Jumlah b	4.283.225.432,37

c. Mutasi kurang berupa:

1) Belanja Modal TA 2013 tidak dikapitalisasi sebesar	782.235.234,00
2) Mutasi ke Aset Lainnya sebesar	4.429.656.325,90
3) Penghapusan akibat TGR (SK No. 024/321/Wako-PP/2013) sebesar	14.600.000,00
4) Reklasifikasi ke AT Gedung dan Bangunan sebesar	258.956.000,00
5) Belanja Modal TA 2013 masih berupa uang muka tanpa ada penyelesaian sebesar	255.939.750,00
6) Mutasi antar SKPD sebesar	905.362.976,00
7) Mutasi ke AT Lainnya karena Rusak Berat sebesar	1.943.949.024,06
Sub Jumlah c	8.590.699.309,96

a + b - c

Rp8.160.801.784,41

Jadi peningkatan nilai peralatan dan mesin dari Saldo Awal 2013 sampai dengan Saldo Akhir 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Saldo awal peralatan dan mesin Tahun 2013	Rp158.364.551.757,63
- Belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2013	12.468.275.662,00
- Mutasi tambah peralatan dan mesin Tahun 2013	4.283.225.432,37
- Mutasi kurang peralatan dan mesin Tahun 2013	(8.590.699.309,96)
Saldo akhir peralatan dan mesin Tahun 2013	Rp166.525.353.542,04

Informasi terkait Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

- Diantara Peralatan dan Mesin diatas terdapat kendaraan roda empat dan roda dua yang dipinjamkaikan kepada Pegawai/Instansi Pemerintah Pusat sebesar Rp922.800.000,00.
- Menindaklanjuti temuan BPK RI Tahun 2012 tentang kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikannya maka pada Tahun anggaran 2013 telah dilakukan pengurusannya sebanyak 4 unit kendaraan bermotor roda 4 dan 15 unit kendaraan roda 2 yang berada pada SKPD Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- c. Peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 5 unit diatas yang berada pada Kantor ketahanan Pangan dan penyuluhan dan tidak memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB, bukti hibah, atau bukti serah terima saat ini telah dicatatkan pada buku inventaris non Aset pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Padang Panjang.

16. Gedung & Bangunan 291.926.434.620,42 275.996.390.810,04

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Padang Panjang pada posisi 31 Desember 2013 dan 2012 yang terdiri dari:

- Bangunan gedung	286.944.065.526,42	272.892.151.927,04
- Bangunan Monumen	4.982.369.094,00	3.104.238.883,00
Jumlah	295.949.112.720,00	275.996.390.810,04

Terdapat kenaikan nilai gedung dan bangunan dalam Neraca dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2013 sebesar Rp15.930.043.810,38 dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2013 Rp22.085.784.685,38

b. Mutasi tambah berupa:

1) Hibah dari Pihak ketiga sebesar	3.505.326.500,00
2) Dikapitalisir dari Belanja Barang Jasa sebesar	1.564.543.681,00
3) Reklasifikasi dari AT Peralatan dan Mesin sebesar	258.956.000,00
4) Reklasifikasi dari AT JIJ sebesar	198.202.000,00
5) Reklasifikasi dari AT KDP sebesar	582.150.119,00
6) Koreksi penyesuaian hasil sensus sebesar	192.000.000,00
7) Mutasi ke Aset Lainnya berupa Gedung Dinas Pendidikan yang kelebihan hapus sebesar	21.791.744,00

Sub Jumlah b 6.322.970.044,00

c. Mutasi kurang berupa:

1) Belanja Modal TA 2013 tidak dikapitalisasi sebesar	52.378.500,00
2) Penghapusan sebesar	2.720.837.791,00
3) Reklasifikasi ke AT Peralatan dan Mesin sebesar	29.635.693,00
4) Reklasifikasi ke AT KDP sebesar	8.257.803.935,00



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

5) Reklasifikasi ke AT Lainnya sebesar	18.935.000,00
6) Mutasi ke Aset Lainnya karena Rusak berat sebesar	1.399.120.000,00
Sub Jumlah c	12.478.710.919,00
a + b - c	Rp15.930.043.810,38

Jadi peningkatan nilai gedung dan bangunan dari saldo awal 2013 sampai dengan saldo akhir 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Saldo awal Gedung dan Bangunan Tahun 2013	Rp275.996.390.810,04
- Belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2013	22.085.784.685,38
- Mutasi tambah gedung dan bangunan Tahun 2013	6.322.970.044,00
- Mutasi kurang gedung dan bangunan Tahun 2013	(12.478.710.919,00)
Saldo akhir Gedung dan Bangunan Tahun 2013	Rp291.926.434.620,42

Informasi lain terkait Aset Tetap Gedung dan Bangunan:

Terdapat Gedung dan Bangunan yang dipinjampakaikan kepada Pegawai/Instansi Pemerintah Pusat sebesar Rp614.407.000,00 berupa Gedung dan Rumah Dinas di Jl.Syeckh M.Jamil Jaho No.12 masing-masing sebesar Rp327.680.000,00 dan Rp286.727.000,00.

17. Jalan, Irigasi dan Jaringan 256.183.201.829,84 225.789.026.889,00

Jumlah tersebut merupakan nilai sarana jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Padang Panjang pada posisi 31 Desember 2013 dan 2012, yang terdiri dari :

a. Jalan dan Jembatan 189.088.208.906,00 164.082.336.906,00

Jumlah tersebut merupakan nilai sarana jalan dan jembatan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Padang Panjang pada posisi 31 Desember 2013 dan 2012.

Terdapat perbedaan penambahan jalan dan jembatan dalam neraca dengan realisasi belanja modal jalan dan jembatan Tahun 2013 sebesar Rp188.613.000,00 .dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi penambahan jalan dan jembatan Tahun 2012	25.005.872.000,00
- Realisasi belanja modal jalan dan jembatan Tahun 2012	(24.817.259.000,00)
Perbedaan	188.613.000,00

Perbedaan tersebut disebabkan :

Mutasi tambah (+) Tahun 2013 yang terdiri dari :

- Mutasi dari KDP Tahun 2012	188.613.000,00
------------------------------	----------------



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Jumlah mutasi tambah	188.613.000,00
Jumlah perbedaan peningkatan jalan dan jembatan dengan realisasi belanja modal jalan dan jembatan	188.613.000,00

Jadi peningkatan nilai jalan dan jembatan dari saldo awal 2013 sampai dengan saldo akhir 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Saldo awal jalan dan jembatan Tahun 2013	164.082.336.906,00
- Belanja modal jalan dan jembatan Tahun 2013	24.817.259.000,00
- Mutasi tambah jalan dan jembatan (diluar belanja modal) Tahun 2013	188.613.000,00
- Saldo akhir jalan dan jembatan Tahun 2013	189.088.208.906,00

b. Sarana dan Bangunan Irigasi 34.639.898.828,00 29.439.642.234,00

Jumlah tersebut merupakan nilai atas sarana dan bangunan irigasi yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Padang Panjang pada posisi 31 Desember 2013 dan 2012. Terdapat perbedaan penambahan sarana dan bangunan irigasi dengan realisasi Belanja Modal Sarana dan Bangunan Irigasi Tahun 2013 sebesar Rp1.378.514.594,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi penambahan sarana dan bangunan irigasi Tahun 2013	5.200.256.594,00
- Realisasi belanja modal sarana dan bangunan irigasi Tahun 2013	(3.821.742.000,00)

Perbedaan 1.378.514.594,00

Perbedaan tersebut disebabkan :

Mutasi tambah (+) Tahun 2013 yang terdiri dari:

- Mutasi dari KDP Tahun 2012	1.344.641.594,00
- Dikapitalisir dari belanja barang dan jasa	26.423.000,00

Jumlah mutasi tambah 1.371.064.594,00

Mutasi kurang (-) Tahun 2013 yang terdiri dari :

- Koreksi nilai neraca Tahun 2013	(7.450.000,00)
-----------------------------------	----------------

Jumlah mutasi kurang (7.450.000,00)

Jumlah perbedaan peningkatan sarana dan bangunan irigasi **1.378.514.594,00**

dengan realisasi belanja modal sarana dan bangunan irigasi

Peningkatan nilai sarana dan bangunan irigasi dari saldo awal 2013 sampai dengan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

saldo akhir 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Saldo awal sarana dan bangunan irigasi Tahun 2013	29.439.642.234,00	
- Belanja modal sarana dan bangunan irigasi Tahun 2013	3.821.742.000,00	
- Mutasi tambah sarana dan bangunan irigasi (diluar belanja modal) Tahun 2013	1.371.064.594,00	
- Mutasi kurang sarana dan bangunan irigasi Tahun 2013	(7.450.000,00)	
Saldo akhir sarana dan bangunan irigasi Tahun 2013	34.639.898.828,00	
c. Instalasi	4.857.908.799,00	4.850.906.599,00

Jumlah tersebut merupakan nilai atas sarana instalasi yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Padang Panjang pada posisi 31 Desember 2013 dan 2012.

Terdapat perbedaan penambahan instalasi dengan realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun 2013 sebesar Rp7.253.292.218,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Realisasi penambahan instalasi Tahun 2013	7.002.200,00
- Realisasi belanja modal instalasi Tahun 2013	(5.392.000,00)
Perbedaan	1.610.200,00

Perbedaan tersebut disebabkan :

Mutasi tambah (+) Tahun 2013 yang terdiri dari :

- Hasil sensus penyesuaian rekening / koreksi (+)	6.340.200,00
Jumlah mutasi tambah	6.340.200,00

Mutasi kurang (-) Tahun 2012 yang terdiri dari :

- Hasil sensus mutasi ke inventaris non aset	(4.730.000,00)
Jumlah mutasi kurang	(4.730.000,00)

Jumlah perbedaan peningkatan instalasi dengan realisasi belanja modal instalasi **1.610.200,00**

Jadi peningkatan nilai instalasi dan jaringan dari saldo awal 2013 sampai dengan saldo akhir 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Saldo awal instalasi dan jaringan Tahun 2013	4.850.906.599,00
- Belanja modal instalasi dan jaringan Tahun 2013	5.392.000,00
- Mutasi tambah instalasi dan jaringan (diluar belanja modal) Tahun 2013	6.340.200,00
- Mutasi kurang instalasi dan jaringan Tahun 2013	(4.730.000,00)
Saldo akhir instalasi dan jaringan Tahun 2013	4.857.908.799,00



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

d. Jaringan 27.597.185.296,84 27.416.141.150,00

Jumlah tersebut merupakan nilai atas sarana jaringan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Padang Panjang pada posisi 31 Desember 2013 dan 2012. Terdapat kenaikan jaringan dengan realisasi belanja modal jaringan Tahun 2013 sebesar Rp181.044.146,84 dengan rincian sebagai berikut:

- Mutasi tambah berupa Realisasi belanja modal jaringan Tahun 2013 (2.818.533.850,00)
- Mutasi kurang berupa koreksi atas jaringan air minum yang telah diserahkan ke PDAM tetapi masih tercatat di Dinas PU sebesar 2.637.489.703,16

Jumlah mutasi kurang 0,00

Jumlah perbedaan peningkatan jaringan dengan realisasi Belanja Modal Instalasi Dan Jaringan **6.795.200,00**

Jadi peningkatan nilai jaringan dari saldo awal 2013 sampai dengan saldo akhir 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Saldo awal jaringan Tahun 2013	27.416.141.150,00
- Belanja modal jaringan Tahun 2013	2.818.533.850,00
- Mutasi kurang jaringan Tahun 2013	(2.637.489.703,16)
Saldo akhir jaringan Tahun 2013	27.597.185.296,84

18. Aset Tetap Lainnya 7.578.737.417,00 7.110.425.189,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Padang Panjang pada posisi 31 Desember 2013 dan 2012, yang terdiri dari:

- Buku/Perpustakaan 6.819.858.779,00 5.943.761.516,00
- Brg.BercorakKesenian/Keb 1.008.554.673,00 872.040.673,00
- Hewan/Ternak & Tumbuh 205.423.000,00 205.423.000,00
- Aset tetap/renovasi 89.200.000,00 89.200.000,00

Jumlah 8.123.036.452,00 8.123.036.452,00

Terdapat perbedaan penambahan Aset Tetap Lainnya dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2013 sebesar Rp797.125.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2013 1.012.611.263,00



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- | | |
|---|------------------|
| - Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2013 | (215.485.513,00) |
|---|------------------|

Perbedaan 797.125.750,00

Perbedaan tersebut disebabkan:

Mutasi tambah (+) Tahun 2013 yang terdiri dari:

- | | |
|--|----------------|
| - Hasil sensus (aset yang belum tercatat) | 870.394.750,00 |
| - Dikapitalisir dari Belanja Barang dan Jasa | 4.900.000,00 |
| - Mutasi antar rekening | 452.000,00 |

Jumlah mutasi tambah 875.746.750,00

Mutasi kurang (-) Tahun 2013 yang terdiri dari :

- | | |
|---|-----------------|
| - Belanja Modal 2013 yang tidak dikapitalisir | (78.169.000,00) |
| - Mutasi antar rekening | (452.000,00) |

Jumlah mutasi kurang (78.621.000,00)

Jumlah perbedaan peningkatan aset tetap lainnya dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Jadi peningkatan nilai aset tetap lainnya dari saldo awal 2013 sampai dengan saldo akhir 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Saldo awal aset tetap lainnya Tahun 2013 | 7.110.425.189,00 |
| - Belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2013 | 215.485.513,00 |
| - Mutasi tambah aset tetap lainnya (diluar belanja modal) Tahun 2013 | 875.746.750,00 |
| - Mutasi kurang aset tetap lainnya Tahun 2013 | (78.621.000,00) |
| - Saldo akhir aset tetap lainnya Tahun 2013 | 8.123.036.452,00 |

19. Konstruksi Dalam Pengerjaan **8.427.714.935,00** **2.285.315.713,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai aset berupa konstruksi/bangunan yang sampai dengan posisi 31 Desember 2013 dan 2012 masih dalam proses pengerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembangunan Mushalla SMPN 1 Padang Panjang yang belum selesai sebesar Rp902.611.000,00;
- Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 4 Padang Panjang yang belum selesai sebesar Rp583.903.356,00;
- Pembangunan Masjid RSUD Kota Padang Panjang yang belum selesai dilaksanakan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- sebesar Rp997.392.401,00;
- Pembangunan Ruang Rapat Fraksi DPRD yang belum selesai sebesar Rp1.934.241.526,00;
 - Biaya perencanaan dan pengawasan Mesjid RSUD Kota Padang Panjang sebesar Rp61.555.552,00;
 - Biaya pengawasan pembangunan Ruang Rapat Fraksi DPRD Kota Padang Panjang senilai Rp33.537.916,00;
 - Perencanaan pembangunan gedung kantor DPPKAD sebesar Rp169.911.000,00;
 - Pembangunan gedung kantor DPPKAD tahap pertama sebesar Rp3.744.562.100,00

20. Akumulasi Penyusutan (238.933.395.888,71) (209.664.617.046,25)

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan posisi 31 Desember 2012 dan 2013, dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2012	Rp209.664.617.046,25
- Koreksi tambah penyusutan tahun berjalan	29.268.778.842,46
- Akumulasi Penyusutan tahun 2013	<u>Rp238.933.395.889,71</u>

Koreksi tambah penyusutan tahun berjalan disebabkan oleh adanya aset-aset yang baru dicatatkan sebagai aset dan aset tetap yang mutasi dari aset tetap menjadi inventaris non aset dan aset lainnya yang merupakan hasil sensus barang milik daerah Tahun Anggaran 2013.

21. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 24.430.557.000,00 21.990.903.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga sampai dengan posisi 31 Desember 2013 dan 2012. Terdapat 3 Kemitraan Pihak Ketiga pada Kota Padang Panjang antara lain:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tentang Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Perkampungan Minangkabau Kota Padang Panjang (MIFAN)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga ini didasarkan atas perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT Niagara Fantasy Island Nomor: 446/PMD-MKV/X-2007
Nomor: 07/NFI/PP/X/07

Pada dokumen perjanjian kerjasama tersebut terdapat lampiran yang merinci jenis aset Pemda yang masuk dalam objek perjanjian, yaitu meliputi bangunan dan segala yang berada di atasnya sebagaimana yang tercantum dalam dokumen berita acara nomor 556/711/Persenibud-PP/X/2007 seharusnya tercatat Rp22.997.057.000,00 namun tercatat pada Kemitraan dengan Pihak ketiga pada Tahun 2012 sebesar



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Rp21.990.903.000,00 sehingga dilakukan koreksi nilai kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp1.006.154.000,00.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tentang Pembangunan Kawasan Perdagangan Di Kelurahan Bukit Surungan

Kemitraan dengan Pihak Ketiga ini didasarkan atas perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT Alam Sejahtera Sejati $\frac{\text{Nomor 001/PMPD-PP/I-2006}}{\text{Nomor 100/ASS/I/2006}}$.

Yang termasuk dalam objek perjanjian kerjasama tersebut adalah 4 persil tanah seluas 4.784m²(tanah seluas 955m², 884 m², 1.028m², dan 1.917 m²). Tiga persil tanah dicatat dengan nilai sebesar Rp1.433.500.000,00 seluas 2.867m², sedangkan tanah seluas 1.917m² belum diketahui nilainya dan belum tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Kota Padang Panjang.

Pembangunan Kawasan Perdagangan di Kelurahan Bukit Surungan telah berlangsung sejak tahun 2003 namun hingga saat ini pihak investor belum menyelesaikan pembangunan kawasan perdagangan tersebut (Pasar Bukit Surungan).

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tentang Pembangunan Pasar Pusat Kota Padang Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga ini didasarkan atas perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT Kultindo Ereshamas

$\frac{\text{Nomor 004/PMPD-PP/IX-2007}}{\text{Nomor 100/ASS/I/2006KE-025/Kontrak/IX/2007}}$ dan mengalami perubahan perjanjian

kerjasama pada tanggal 16 April 2013 sehingga dibuat perjanjian kerjasama baru

dengan $\frac{\text{Nomor 004/PMPD-PP/IX-2007}}{\text{Nomor 100/ASS/I/2006KE-025/Kontrak/IX/2007}}$.

Yang termasuk dalam objek perjanjian kerjasama tersebut tanah seluas 16.200m².

Perjanjian kerjasama tersebut hingga saat ini belum dapat dilaksanakan.

22. Aset Lain-Lain 27.506.966.796,79 19.559.123.147,02

Aset lainnya bertambah senilai Rp7.947.843.649,77. Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap yang kondisinya Rusak Berat, fisik barang tidak ditemukan, dan inventaris yang nilainya kurang dari Rp300.000,00 (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset) sampai dengan posisi 31 Desember 2013 dan 2012.

Penjelasan tambahan:

- a. Aset Tetap yang mutasi ke Aset Lainnya merupakan aset yang tidak memenuhi syarat kapitalisir (nilai kurang dari Rp300.000,00 dan masa manfaat kurang dari 1 tahun) serta aset tetap yang fisiknya tidak ditemui saat sensus dilakukan;



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- b. Aset-aset tersebut diatas sementara ditempatkan pada aset lainnya sampai ada kejelasan status aset tersebut dari Inspektorat (aset-aset yang tidak ada fisiknya dan yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi di laporkan kepada Inspektorat Kota untuk dimintakan kejelasan statusnya);
- c. Dalam Aset Lainnya senilai Rp7.947.843.649,77 terdapat aset tetap yang menjadi temuan Inspektorat Provinsi Tahun 2013 atas aset-aset rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota yang tidak ditemukan senilai Rp119.800.750,00;
- d. Aset lainnya pada RSUD Kota Padang Panjang bertambah senilai Rp72.738.227,00 yang berasal dari Peralatan Mesin yang tidak digunakan pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang (mutasi dari Aset Peralatan Dan Mesin Dinas Kesehatan Rp70.613.227,00 dan dari Aset Lainnya Dinas Kesehatan senilai Rp2.125.000,00 ke Aset Lainnya RSUD Kota Padang Panjang senilai Rp72.738.227,00. Aset lainnya diatas belum dilengkapi dengan dokumen pendukung (Berita acara pengalihan pencatatan aset) dikarenakan kondisi barang tersebut masih butuh perbaikan maka kemungkinan aset tersebut dikembalikan kepada pengelola jika aset tersebut tidak dapat diperbaiki.

23. Utang Perhitungan Pihak Ketiga 9.021.092,00 1.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada posisi per 31 Desember 2013 dan 2012. Utang PFK tersebut muncul karena masih adanya pungutan atau potongan rekening pihak ketiga di kas bendahara pengeluaran yang belum disetorkan ke rekening terkait sampai dengan akhir tahun anggaran per 31 Desember 2013 dan 2012. Saldo Utang PFK tersebut, terdiri dari:

Bendahara Pengeluaran

- Pph Psl 21	1.442.000,00	1.000,00
- PPh Psl 22	806.046,00	0,00
- PPh Psl 23	220.855,00	0,00
- PPN	4.118.341,00	0,00
- Pajak Daerah	2.433.850,00	0,00
Jumlah	9.021.092,00	1.000,00

24. Utang Jk. Pendek Lainnya 1.995.440.424,80 1.429.635.044,00

a. Tagihan rekening listrik	263.227.858,00	314.785.087,00
b. Tagihan rekening Air	21.204.620,00	40.603.020,00
c. Tagihan rekening telpon	33.568.544,00	55.956.919,00



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

d. Tagihan Internet/Faximili	19.154.602,00	0,00
e. Kewajiban lain-lain:		
- Utang Jasa Medis	1.041.961.687,80	1.018.290.018,00
- Utang Pelayanan Kesehatan	216.657.507,00	0,00
- Biaya STNK	723.000,00	0,00
- Obat-obatan pada RSUD	210.639.670,00	0,00
- BHP Alkes pada RSUD	169.353.229,00	0,00
- Bahan Kimia Labor	11.549.707,00	0,00
- Pengisian gas medis	7.400.000,00	0,00
- Pelayanan Kesehatan	216.657.507,00	
f. Kelebihan Bagi Hasil PBBKB dan PAPdari Provinsi	0,00	0,00
Jumlah	1.995.440.424,80	1.429.635.044,00
25. SILPA	81.402.082.735,64	67.577.692.601,17
- Kas di Kas Daerah	28.256.694.886,71	28.205.201.615,17
- Kas di Bendahara Pengeluaran berupa UYHD	19.536.503,00	22.491.986,00
- Deposito	49.350.000.000,00	39.350.000.000,00
- Kas di Bendahara BLUD	3.784.872.437,93	0,00
- Uang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	(9.021.092,00)	(1.000,00)
Jumlah	81.402.082.735,64	67.577.692.601,17
26. Pendapatan yang Ditangguhkan	12.038.349,90	26.135.500,00
Perkiraan ini merupakan penyeimbang perkiraan Kas di Bendahara Penerimaan.		
27. Cadangan Piutang	2.492.231.351,84	1.250.220.762,00
Cadangan piutang ini merupakan pasangan dari perkiraan/rekening piutang pada pos aset lancar terdiri dari Cadangan Piutang Pajak, Cadangan Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Cadangan Piutang Retribusi, dan Cadangan Piutang Lainnya Tahun 2013 dan 2012.		
28. Cadangan Persediaan	4.606.878.206,00	4.750.931.721,27
Cadangan persediaan ini merupakan pasangan dari perkiraan/rekening persediaan pada pos aset lancar.		
29. Dana yang harus Disediakan untuk	(1.995.440.424,80)	(1.429.635.044,00)



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Pembayaran Utang Jk. Pendek

Dana sejumlah tersebut merupakan dana yang harus disediakan untuk pembayaran Hutang Jangka Pendek Pemerintah Kota Padang Panjang per 31 Desember 2013 dan 2012.

30. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 47.914.736.395,08 35.828.904.168,64

Jumlah tersebut merupakan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kota Padang Panjang yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, berupa:

- Investasi Nonpermanen lainnya	5.102.825.950,29	4.848.061.390,98
- Penyertaan Modal Pemda	42.811.910.444,79	30.980.842.777,66
Jumlah	47.914.736.395,08	35.828.904.168,12

31. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 654.352.951.370,59 622.406.919.211,42

Jumlah tersebut merupakan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kota Padang Panjang yang tertanam dalam Aset Tetap, berupa:

- Tanah	162.644.904.915,00	162.525.825.899,00
- Peralatan dan Mesin	166.525.353.542,04	158.359.551.757,63
- Gedung & Bangunan	291.926.434.620,42	275.996.390.810,04
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	256.183.201.829,84	225.794.026.889,00
- Aset Tetap Lainnya	7.578.737.417,00	7.110.425.189,00
- Konstruksi dlm. Pengerjaan	8.427.714.935,00	2.285.315.713,00
- Akumulasi penyusutan aktiva tetap	(238.933.395.888,71)	(209.664.617.046,25)
Jumlah	654.352.951.370,59	622.406.919.211,42

32. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 51.937.523.796,79 41.550.026.147,02

Jumlah tersebut merupakan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kota Padang Panjang yang tertanam dalam aset lainnya, berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang siap untuk dihapuskan dan aset kemitraan dengan pihak ketiga.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

5.3 Laporan Arus Kas

No.	Perkiraan	Tahun 2013(Rp)	Tahun 2012(Rp)
1.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
1.1	Arus Masuk Kas	397.429.462.097,90	372.751.900.403,28
	Jumlah tersebut merupakan arus masuk kas dari Aktivitas Operasi selama TA 2013 dan 2012, yang terdiri dari:		
-	Pendapatan Pajak Daerah	4.060.955.402,00	3.514.177.859,00
-	Pendapatan Retribusi Daerah	5.355.477.609,22	19.308.185.675,58
-	Pendapatan. Hasil P engelolaan Kekayaan Daerah Dipisah	4.259.913.723,00	4.101.829.156,00
-	Lain-lain PAD yang Syah	8.251.484.923,68	5.359.537.609,70
-	Dana Bagi Hasil Pajak	15.336.319.838,00	12.041.231.876,00
-	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	932.374.002,00	8.741.026.227,00
-	Dana Alokasi Umum	302.846.549.000,00	269.610.492.000,00
-	Dana Alokasi Khusus	17.049.495.000,00	18.629.610.000,00
-	Dana Penyesuaian	28.620.181.000,00	22.296.642.000,00
-	Bantuan Keuangan dari Propinsi	1.092.631.600,00	0,00
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	9.624.080.000,00	9.149.168.000,00
-	Lain-lain Pendapatan yang Syah	0,00	0,00
-	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
-	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
	Jumlah	397.429.462.097,90	372.751.900.403,28
1.2	Arus Keluar Kas	309.458.725.674,98	302.717.325.583,68
	Jumlah tersebut merupakan arus keluar kas atas Aktivitas Operasi selama TA 2013 dan 2012, yang terdiri dari:		
-	Belanja Pegawai	224.089.575.579,00	204.249.169.968,00
-	Belanja Barang	74.627.191.096,30	81.315.223.119,00
-	Bunga	0,00	0,00
-	Hibah	9.017.499.356,00	12.022.521.290,00
-	Bantuan Sosial	968.779.500,00	2.164.477.000,00
-	Belanja Bantuan Keuangan	449.641.143,68	499.641.143,68



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- Belanja Tak Terduga	306.039.000,00	2.466.293.063,00
- Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
- Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
Jumlah	309.458.725.674,98	302.717.325.583,68
1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	87.970.736.422,92	70.034.574.819,60
<p>Jumlah tersebut merupakan selisih surplus antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi. Arus kas bersih tersebut merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah Kota Padang Panjang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.</p>		
2. Arus kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		
2.1 Arus Masuk Kas	191.500.000,00	136.877.000,00
<p>Arus masuk kas merupakan penerimaan kas yang diperoleh dari penjualan aset daerah dalam TA 2013 dan 2012 sehingga arus masuk kas sebesar Rp191.500.000,00 dan Rp136.877.000,00 yang terdiri dari:</p>		
Kendaraan	0,00	136.877.000,00
Gedung dan Bangunan	79.700.000,00	0,00
Peralatan/perlengkapan Kantor	111.800.000,00	0,00
Jumlah	191.500.000,00	136.877.000,00
2.2 Arus Keluar Kas	68.115.718.726,38	47.111.849.228,00
<p>Jumlah tersebut merupakan arus keluar kas atas Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan selama TA 2013 dan 2012, yang terdiri dari:</p>		
- Belanja Tanah	1.803.979.016,00	79.500.000,00
- Belanja Peralatan & Mesin	12.368.275.662,00	15.366.681.421,00
- Belanja Gedung & Bangunan	22.085.784.685,38	11.093.747.522,00
- Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	31.661.128.850,00	20.209.345.782,00
- Belanja Aset Tetap Lainnya	196.550.513,00	362.574.503,00
Jumlah	68.115.718.726,38	47.111.849.228,00



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas (67.924.218.726,38) (46.974.972.228,00)

Investasi Aset Non Keuangan

Jumlah tersebut merupakan selisih minus antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan. Arus kas bersih tersebut bertujuan meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

3.1 Arus Masuk Kas 0,00 0,00

Arus masuk kas mencerminkan penerimaan kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit dalam TA 2013 dan 2012. Tidak terdapat penerimaan kas dari Aktivitas Pembiayaan.

3.2 Arus Keluar Kas 10.007.000.000,00 8.700.000.000,00

Arus keluar kas mencerminkan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan penggunaan surplus anggaran. Transaksi arus keluar kas dari Aktivitas Pembiayaan dalam TA 2013 dan 2012 terdiri dari:

- Penyertaan modal Pemko	10.007.000.000,00	8.700.000.000,00
- Pembay. Pokok Pinjaman	0,00	0,00

Jumlah	10.007.000.000,00	8.700.000.000,00
---------------	--------------------------	-------------------------

3.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas (10.007.000.000,00) (8.700.000.000,00)

Pembiayaan

Jumlah tersebut merupakan selisih minus antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari Aktivitas Pembiayaan. Arus kas bersih minus dari Aktivitas Pembiayaan ini menggambarkan adanya pengeluaran kas untuk pembiayaan.

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

4.1 Arus Masuk Kas 49.620.533.798,93 12.724.194.485,67

Arus masuk kas mencerminkan penerimaan kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan pemerintah daerah berupa perhitungan pihak ketiga. Jumlah arus masuk kas selama Tahun 2013 sejumlah tersebut berasal dari penerimaan PFK sebesar Rp30.203.886.229,00, Penerimaan UP TA 2013 sebesar Rp22.490.986,00 dan pendapatan BLUD sebesar Rp19.394.156.583,93 dengan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

rincian sebagai berikut:

- Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	30.203.886.229,00	12.086.897.788,00
- Penerimaan UP tahun lalu	22.490.986,00	637.296.697,67
- Pendapatan BLUD	19.394.156.583,93	0,00
- Penerimaan Kontra Pos	0,00	0,00
Jumlah	49.620.533.798,93	12.724.194.485,67

4.2 Arus Keluar Kas 45.823.685.786,00 12.109.388.774,00

Arus keluar kas mencerminkan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan pemerintah daerah berupa perhitungan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	30.203.886.229,00	12.086.897.788,00
- Perhitungan UP tahun lalu yang belum dipertanggungjawabkan	10.515.411,00	22.490.986,00
- Belanja Pegawai BLUD	46.585.000,00	0,00
- Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.462.699.146,00	0,00
- Belanja Modal-Peralatan Mesin BLUD	100.000.000,00	0,00
Jumlah	45.823.685.786,00	12.109.388.774,00

Rincian pengeluaran PFK adalah sebagai berikut:

Kas Daerah

- PPh Pasal 21	2.560.628.926,00	2.690.955.011,00
- Iuran Wajib Pegawai 10%	9.648.852.974,00	9.166.688.777,00
- Taperum	224.168.000,00	229.254.000,00
Jumlah	30.203.886.229,00	12.086.897.788,00

Commented [M8]: Belum sesuai/Sama

4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 3.796.848.012,93 614.805.711,67

Anggaran

Jumlah tersebut merupakan selisih surplus antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari Aktivitas Non Anggaran.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

5	Saldo Akhir Kas	81.391.567.324,64	67.555.201.615,17
	Saldo akhir kas merupakan Kas Daerah Tahun 2013 dan 2012, sebagai berikut:		
	- Kas di Kas Daerah	28.256.694.886,71	28.205.201.615,17
	- Deposito	49.350.000.000,00	39.350.000.000,00
	- Kas di Bendahara BLUD	3.784.872.437,93	0,00
6	Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	19.536.503,00	22.491.986,00
7	Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan	12.038.349,90	26.135.500,00

6. Penutup

Demikianlah beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang, semoga dapat memperjelas terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2013 Pemerintah Kota Padang Panjang.

WALIKOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS